



Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Journal homepage: <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>

Pengaruh Sustainability Assurance, Regulasi Pemerintah, dan Tekanan Stakeholder terhadap Kualitas Laporan ESG di Pasar Modal Indonesia

Faaiqotun Nikmah Irsyani¹, Safira Permata Kristia Putri², Maria Yovita R. Pandin³

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 Desember 2025

Revised: 20 Desember 2025

Accepted: 1 Januari 2026

Keywords:

Sustainability assurance

regulasi pemerintah

tekanan stakeholder

kualitas laporan ESG

Keberlanjutan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain explanatory research. Sampel ditentukan melalui purposive sampling terhadap perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan data ESG yang lengkap. Data sekunder diperoleh dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan, serta sumber resmi BEI dan OJK, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG, baik secara parsial maupun simultan. Sustainability assurance menjadi variabel paling dominan ($\beta = 0,919$) dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,915. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan ESG dipengaruhi oleh kombinasi mekanisme internal dan tekanan eksternal perusahaan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan, regulator, dan investor dalam meningkatkan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

This study examines the effect of sustainability assurance, government regulation, and stakeholder pressure on the quality of ESG reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. A quantitative explanatory research design was employed, with samples selected through purposive sampling based on data availability and completeness. Secondary data were obtained from sustainability reports, annual reports, and official sources of the IDX and Financial Services Authority (OJK), and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that sustainability assurance, government regulation, and stakeholder pressure have a positive and significant effect on ESG report quality, both individually and simultaneously. Sustainability assurance is the most dominant factor ($\beta = 0.919$), with an R^2 value of 0.915. These findings suggest that ESG report quality is driven by the interaction of internal corporate mechanisms and external pressures, providing important implications for companies, regulators, and investors in strengthening sustainability reporting practices in Indonesia.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Faaiqotun Nikmah Irsyani

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Jl. Semolowaru No. 45, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. 60118

Email: faaiq0904@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) di pasar modal Indonesia menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari penerapan keuangan berkelanjutan. Hingga beberapa tahun terakhir, jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability report di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengalami peningkatan, khususnya setelah ESG menjadi salah satu pertimbangan utama investor institusional dalam pengambilan keputusan investasi. Namun demikian, peningkatan kuantitas pelaporan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas laporan ESG yang dihasilkan.

Fenomena empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas laporan ESG antarperusahaan masih sangat bervariasi. Sejumlah laporan keberlanjutan disusun secara minimalis, bersifat simbolik, dan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja keberlanjutan yang sesungguhnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait praktik

greenwashing, yakni ketika perusahaan menggunakan pelaporan ESG sebagai alat legitimasi tanpa didukung oleh pengungkapan yang andal dan terverifikasi. Variasi kualitas pelaporan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin kualitas laporan ESG, sehingga diperlukan mekanisme lain baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Dalam literatur sebelumnya, kualitas laporan ESG umumnya dikaitkan dengan faktor tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, atau karakteristik dewan direksi. Beberapa studi juga menyoroti peran tekanan stakeholder dan regulasi pemerintah sebagai determinan pengungkapan keberlanjutan. Namun, penelitian yang secara simultan menguji peran sustainability assurance sebagai mekanisme verifikasi independen bersama dengan regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia, masih relatif terbatas. Padahal, sustainability assurance berpotensi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kredibilitas dan keandalan informasi ESG yang disajikan perusahaan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada periode awal penerapan pelaporan keberlanjutan atau menggunakan konteks negara maju, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika terbaru praktik ESG di Indonesia pasca penguatan regulasi dan meningkatnya tekanan investor terhadap isu keberlanjutan. Dengan demikian, terdapat research gap yang jelas terkait keterbatasan studi empiris yang mengintegrasikan mekanisme internal perusahaan (melalui sustainability assurance) dan tekanan eksternal (melalui regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder) dalam menjelaskan kualitas laporan ESG pada perusahaan publik di Indonesia dalam periode terkini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Novelty penelitian ini terletak pada pengujian kombinasi tiga determinan utama kualitas laporan ESG yang mencakup mekanisme internal dan eksternal perusahaan secara simultan, dengan fokus pada konteks pasar modal Indonesia yang sedang berada dalam fase transisi menuju penguatan praktik keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pengukuran kualitas laporan ESG yang menekankan aspek keterandalan, kelengkapan, dan transparansi pengungkapan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif terhadap literatur pelaporan keberlanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan publik dalam meningkatkan kualitas pelaporan ESG, bagi regulator dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan keberlanjutan, serta bagi investor dalam menilai kredibilitas informasi ESG yang disajikan di pasar modal Indonesia.

KAJIAN TEORI

Landasan Teoretis Pelaporan ESG

Pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan instrumen utama perusahaan dalam mengomunikasikan komitmen keberlanjutan kepada publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks akademik, kualitas pelaporan ESG dapat dijelaskan melalui integrasi teori legitimasi, teori stakeholder, dan teori akuntabilitas. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan motivasi perusahaan dalam meningkatkan transparansi, kepatuhan, serta kredibilitas laporan keberlanjutan. Teori legitimasi menekankan aspek penerimaan sosial, teori stakeholder menyoroti tekanan dari pihak berkepentingan, sedangkan teori akuntabilitas menjelaskan kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban yang andal. Integrasi ketiganya membentuk kerangka konseptual yang kuat dalam menjelaskan pengaruh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG.

Teori Legitimasi dan Kualitas Laporan ESG

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berupaya memastikan operasionalnya selaras dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial agar memperoleh pengakuan dan keberlanjutan eksistensi (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Dalam konteks ESG, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana legitimasi yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Namun, legitimasi yang diperoleh melalui pelaporan ESG bersifat rapuh apabila informasi yang disampaikan tidak kredibel atau bersifat simbolik. Oleh karena itu, kualitas laporan ESG menjadi elemen kunci dalam mempertahankan legitimasi perusahaan. Regulasi pemerintah, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, berperan sebagai tekanan legitimasi formal (coercive legitimacy), yang memaksa

perusahaan untuk menyusun laporan ESG sesuai standar tertentu. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbandingan dan konsistensi laporan, sehingga memperkuat legitimasi perusahaan di mata regulator dan publik.

Teori Stakeholder dan Tekanan terhadap Pelaporan ESG

Teori stakeholder berangkat dari pandangan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, termasuk investor, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah (Freeman, 1984; Mitchell et al., 1997). Dalam kerangka ini, tekanan stakeholder menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan ESG.

Investor institusional, lembaga pemerintah ESG, media, dan masyarakat sipil semakin menuntut informasi keberlanjutan yang relevan dan dapat dipercaya. Tekanan tersebut mendorong perusahaan untuk tidak hanya meningkatkan volume pengungkapan, tetapi juga kualitas laporan ESG agar dapat memenuhi ekspektasi stakeholder dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, tekanan stakeholder berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memperkuat praktik pelaporan ESG, sekaligus melengkapi peran regulasi pemerintah dalam kerangka legitimasi perusahaan.

Teori Akuntabilitas dan Peran Sustainability Assurance

Teori akuntabilitas menegaskan bahwa organisasi memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mempertanggungjawabkan dampak aktivitasnya kepada pihak berkepentingan melalui informasi yang akurat, transparan, dan dapat diverifikasi (Gray et al., 1996; Bovens, 2007). Dalam konteks pelaporan ESG, akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan semata, tetapi juga membutuhkan mekanisme penjaminan independen untuk memastikan keandalan informasi.

Sustainability assurance berperan sebagai instrumen akuntabilitas yang memperkuat kredibilitas laporan ESG melalui proses verifikasi oleh pihak ketiga independen (Simnett et al., 2009; Hodge et al., 2009). Keberadaan assurance mengurangi asimetri informasi dan potensi bias manajemen, sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG. Oleh karena itu, assurance berfungsi sebagai mekanisme internal perusahaan yang menjembatani tuntutan legitimasi dan tekanan stakeholder dengan praktik pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sintesis Teoretis dan Keterkaitan Antarvariabel

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan ESG dipengaruhi oleh interaksi antara tekanan eksternal dan mekanisme internal perusahaan. Regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder menciptakan dorongan eksternal yang memotivasi perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan ESG demi memperoleh legitimasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Sementara itu, sustainability assurance berperan sebagai mekanisme internal yang memastikan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan tersebut diwujudkan dalam laporan ESG yang kredibel dan berkualitas.

Dengan demikian, teori legitimasi menjelaskan mengapa perusahaan perlu melaporkan ESG, teori stakeholder menjelaskan siapa yang mendorong peningkatan kualitas pelaporan, dan teori akuntabilitas menjelaskan bagaimana kualitas pelaporan tersebut dapat dijamin. Integrasi ketiga teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menjelaskan pengaruh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG.

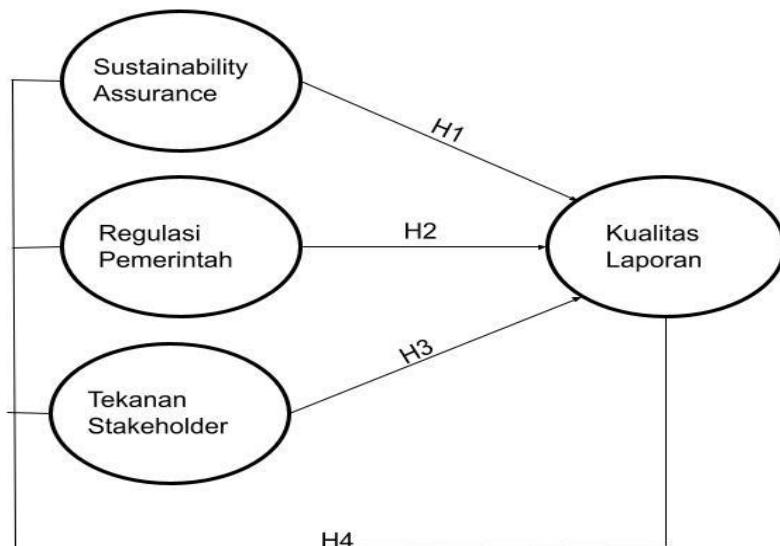
Implikasi Teoretis bagi Penelitian

Kerangka teoretis terintegrasi ini menempatkan kualitas laporan ESG sebagai hasil dari kombinasi faktor institusional dan mekanisme tata kelola internal perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur pelaporan keberlanjutan dengan menguji secara empiris hubungan simultan antara sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder dalam satu model analisis, khususnya pada konteks pasar modal Indonesia.

Kerangka konseptual

Kerangka konseptual ini memvisualisasikan korelasi antara sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan. Ketiga variabel independen tersebut diestimasi mempunyai pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada variabel dependen yaitu kualitas laporan. Pertama, sustainability assurance dianggap dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan keberlanjutan, karena proses verifikasi eksternal memberi jaminan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan transparan. Kedua, regulasi pemerintah berperan sebagai dorongan formal agar organisasi mematuhi standar pelaporan yang telah diputuskan, alhasil kualitas laporan bertambah stabil dan selaras dengan ketentuan yang ada. Ketiga, tekanan dari *stakeholder* layaknya investor, konsumen, maupun khalayak umum dapat mendorong organisasi untuk menyajikan laporan yang lebih lengkap dan relevan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selain itu, hubungan antarvariabel juga menunjukkan adanya potensi interaksi atau pengaruh simultan, di mana kombinasi dari ketiga faktor tersebut bersama-sama memperkuat kualitas laporan yang dihasilkan.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder diasumsikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan ESG. Assurance berperan memperkuat kredibilitas laporan melalui verifikasi independen, sementara regulasi menyediakan pedoman pelaporan yang mendorong konsistensi dan kepatuhan. Tekanan stakeholder menuntut entitas bisnis agar kian transparan serta akuntabel dalam menyajikan informasi kelestarian. Berlandaskan keterkaitan itu, studi ini memformulasikan hipotesis H1-H3 demi menguji pengaruh setiap variabel, juga H4 demi menelaah pengaruh ketiganya secara serentak terhadap kualitas laporan ESG.

Pengaruh Sustainability Assurance terhadap Kualitas Laporan ESG

Sustainability assurance merupakan mekanisme verifikasi independen yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kredibilitas informasi keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan. Berdasarkan teori akuntabilitas, perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dan sosialnya kepada para pemangku kepentingan melalui informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Keberadaan assurance eksternal berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi serta potensi bias manajerial dalam pelaporan ESG, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap laporan yang disajikan.

Secara empiris, Simnett et al. (2009) dan Hodge et al. (2009) menemukan bahwa perusahaan yang

menggunakan sustainability assurance cenderung memiliki kualitas pengungkapan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa assurance. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Setiatin (2024) dan Utami et al. (2024) dalam konteks Indonesia, yang menunjukkan bahwa assurance eksternal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan kredibilitas laporan ESG. Oleh karena itu, berdasarkan teori akuntabilitas dan bukti empiris sebelumnya, sustainability assurance diprediksi memiliki hubungan sebab-akibat positif terhadap kualitas laporan ESG.

Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan ESG

Regulasi pemerintah berperan sebagai tekanan institusional yang mendorong perusahaan untuk mematuhi standar dan ketentuan pelaporan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori legitimasi, kepatuhan terhadap regulasi merupakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari regulator dan masyarakat. Penerapan POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk menyusun laporan keberlanjutan secara sistematis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsistensi, keterbandingan, dan kualitas laporan ESG.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Hidayati (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi OJK berhubungan positif dengan kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia. Temuan internasional juga menunjukkan bahwa tekanan regulatif mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan non-keuangan guna memenuhi ekspektasi institusional (Deegan, 2002). Dengan demikian, regulasi pemerintah dipandang sebagai faktor penyebab yang mendorong peningkatan kualitas laporan ESG melalui mekanisme legitimasi formal.

Pengaruh Tekanan Stakeholder terhadap Kualitas Laporan ESG

Tekanan stakeholder mencerminkan tuntutan dari berbagai pihak berkepentingan, seperti investor, pelanggan, masyarakat, dan media, terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan merespons tuntutan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dengan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk laporan ESG. Tekanan ini mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya guna menjaga reputasi dan hubungan dengan stakeholder utama.

Secara empiris, Nurdialy dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa tekanan investor dan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan ESG perusahaan publik di Asia Tenggara. Studi internasional oleh Mitchell et al. (1997) dan Gray et al. (1996) juga menegaskan bahwa intensitas tekanan stakeholder berbanding lurus dengan tingkat transparansi dan kualitas pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan teori stakeholder dan bukti empiris sebelumnya, tekanan stakeholder diperkirakan memiliki hubungan sebab-akibat positif terhadap kualitas laporan ESG.

Pengaruh Simultan Sustainability Assurance, Regulasi Pemerintah, dan Tekanan Stakeholder terhadap Kualitas Laporan ESG

Kualitas laporan ESG tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara mekanisme internal dan tekanan eksternal perusahaan. Regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder menciptakan dorongan eksternal bagi perusahaan untuk meningkatkan pelaporan ESG demi memperoleh legitimasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Sementara itu, sustainability assurance berperan sebagai mekanisme internal yang memastikan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan tersebut diwujudkan dalam laporan yang kredibel dan berkualitas. Integrasi teori legitimasi, teori stakeholder, dan teori akuntabilitas menunjukkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut secara simultan akan memperkuat kualitas laporan ESG. Temuan empiris sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberadaan tekanan regulatif, tuntutan stakeholder, dan mekanisme assurance secara bersama-sama meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan (Deegan, 2002; Simnett et al., 2009). Dengan demikian, ketiga variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh simultan terhadap kualitas laporan ESG.

1. H1: Sustainability assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG

2. H2: Regulasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG
3. H3: Tekanan stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG
4. H4: Assurance, regulasi, dan tekanan stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG (simultan)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji hipotesis berbasis teori melalui analisis statistik terhadap data numerik.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2020–2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan tercatat di BEI secara konsisten selama periode penelitian, (2) perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan minimal dua tahun berturut-turut, (3) laporan keberlanjutan dapat diakses secara publik, dan (4) data yang dibutuhkan untuk seluruh variabel penelitian tersedia secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan, serta sumber resmi Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen publik perusahaan dan basis data resmi yang relevan dengan pelaporan ESG.

Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

Variabel dependen adalah **kualitas laporan ESG**, yang diukur menggunakan metode content analysis berdasarkan indeks pengungkapan ESG yang disusun mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Standards dan ketentuan pelaporan OJK. Penilaian kualitas dilakukan dengan memperhatikan aspek kelengkapan, keterbandingan, kejelasan, dan keandalan informasi ESG yang diungkapkan perusahaan. Setiap indikator diberi skor sesuai tingkat pengungkapan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor kualitas laporan ESG.

Variabel independen pertama adalah **sustainability assurance**, yaitu keberadaan penjaminan independen terhadap laporan keberlanjutan oleh pihak ketiga. Variabel ini diukur menggunakan skala dummy, dengan nilai 1 apabila perusahaan menggunakan sustainability assurance dan nilai 0 apabila tidak menggunakan assurance.

Variabel independen kedua adalah **regulasi pemerintah**, yang diukur berdasarkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Pengukuran dilakukan dengan menilai pemenuhan unsur pelaporan keberlanjutan yang diwajibkan oleh regulasi tersebut.

Variabel independen ketiga adalah **tekanan stakeholder**, yang mencerminkan intensitas tuntutan dari pihak berkepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas ESG. Variabel ini diukur melalui indikator kuantitatif berupa frekuensi pengungkapan respons perusahaan terhadap isu ESG dalam laporan keberlanjutan serta jumlah eksposur isu keberlanjutan perusahaan dalam media selama periode penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode **regresi linier berganda** dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kualitas laporan ESG. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ESGQ = \alpha + \beta_1 ASS + \beta_2 REG + \beta_3 STK + \epsilon$$

di mana ESGQ adalah kualitas laporan ESG, ASS adalah sustainability assurance, REG adalah regulasi pemerintah, STK adalah tekanan stakeholder, α merupakan konstanta, β_1 – β_3 adalah koefisien regresi, dan ϵ adalah error term.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2020–2024. Pemilihan periode tersebut bertujuan untuk menangkap dinamika pelaporan ESG pasca penguatan regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Uji normalitas

Tabel 1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,75882025
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,040
	Negative	-,049
Test Statistic		,049
Asymp. Sig. (2-tailed)^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)^e	Sig.	,504
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,491
	Upper Bound	,517

Sumber: Data dioalah dengan SPSS 22

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test memperlihatkan taraf signifikansi senilai 0,200 ($> 0,05$), yang bermakna data *residual* tersebut secara normal. Keadaan tersebut menyiratkan bahwasanya model regresi telah mencukupi prasyarat normalitas.

Uji Heteroskedastisitas (Naratif)

Tabel 2 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant) 6,578	1,966		3,346	,001		

Sustainability_A ssurance	-,087	,478	-,015	-,181	,856	,972	1,029
Regulasi_Pemer intah	-2,671	2,043	-,109	-1,307	,193	,972	1,029
Tekanan_Stake holder	-,008	,016	-,042	-,506	,614	,991	1,009

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengidentifikasi apakah pada model regresi timbul ketimpangan varians *residual* satu sama lain. Model regresi yang prima semestinya mempunyai varians *residual* yang stabil atau bersih dari tanda heteroskedastisitas, sebab jika indikasi tersebut hadir maka output taksiran koefisien regresi menjadi tak efisien.

Berdasarkan hasil analisis SPSS melalui model absres (absolute residual), didapatkan angka signifikansi tiap-tiap variabel bebas yakni: *Sustainability Assurance* sebesar 0,856, *Regulasi Pemerintah* sebesar 0,193, dan *Tekanan Stakeholder* sebesar 0,614. Seluruh angka itu melampaui level signifikansi 0,05, yang bermakna nihil korelasi nyata antara variabel bebas terhadap nilai *residual* mutlak.

Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan jika model regresi pada studi ini lepas dari gejala heteroskedastisitas. Maknanya, varians *residual* antar pengamatan berkarakter homogen, serta model regresi yang dipakai sudah melengkapi salah satu prasyarat asumsi klasik demi memproduksi estimasi yang *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji multikolinearitas

Tabel 3 *Coefficients^a*

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Toleranc e	VIF
1	(Constant)	6,578	1,966		3,346	,001	
	Sustainability_A ssurance	-,087	,478	-,015	-,181	,856	,972
	Regulasi_Pemer intah	-2,671	2,043	-,109	-1,307	,193	,972
	Tekanan_Stake holder	-,008	,016	-,042	-,506	,614	,991

Sumber: Data dioalah dengan SPSS 22

menunjukkan angka *Tolerance* bagi segenap variabel $> 0,1$ serta *VIF* < 10 , masing-masing: *Sustainability Assurance* = *VIF* 1,029, *Regulasi Pemerintah* = *VIF* 1,029, *Tekanan Stakeholder* = *VIF* 1,009. Dengan demikian, tidak ditemukan gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Angka *Durbin-Watson* sejumlah 1,936 mengisyaratkan jika tidak berlangsung autokorelasi autokorelasi dalam model, karena nilai tersebut berada di kisaran 1,5 – 2,5. Hasil uji heteroskedastisitas (dilihat dari model absres) menunjukkan taraf signifikansi segenap variabel $> 0,05$, alhasil diputuskan tidak timbul heteroskedastisitas. Dengan begitu, model regresi mengakomodasi seluruh asumsi klasik.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. *Coefficients^a*

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Toleranc e	VIF
1	(Constant)	6,578	1,966		3,346	,001	
	Sustainability_A ssurance	-,087	,478	-,015	-,181	,856	,972
	Regulasi_Pemer intah	-2,671	2,043	-,109	-1,307	,193	,972
	Tekanan_Stake holder	-,008	,016	-,042	-,506	,614	,991

Tekanan_Stakeholder	-,008	,016	-,042	-,506	,614	,991	1,009
---------------------	-------	------	-------	-------	------	------	-------

Sumber: Data dioolah dengan SPSS 22

Model regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 42,862 + 30,013X_1 + 21,175X_2 + 0,154X_3Y$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan ESG

X₁ = Sustainability Assurance

X₂ = Regulasi Pemerintah

X₃ = Tekanan Stakeholder

Persamaan tersebut menyatakan yakni semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan ESG.

Nilai R = 0,957 mengindikasikan korelasi yang sedemikian erat antara ketiga peubah bebas terhadap kualitas laporan ESG. Angka R Square = 0,915 menandakan 91,5% fluktuasi kualitas laporan ESG mampu diuraikan oleh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder, sementara tersisa 8,5% ditentukan elemen berbeda di eksternal kerangka.

Uji F (Simultan)

Tabel 3 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
					,733	,534 ^b
1	Regression	3	6,061			
	Residual	146	8,272			
	Total	149				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22

Output tes ANOVA memperlihatkan poin F = 523,518 serta signifikansi = 0,000 (< 0,05). Kondisi ini bermakna bawasanya secara bersama-sama *sustainability assurance*, regulasi pemerintah, maupun tekanan *stakeholder* memberikan pengaruh substansial pada kualitas laporan ESG. Alhasil, model regresi yang diterapkan pantas demi memaparkan keterkaitan antarvariabel penelitian.

Uji t (Parsial)

Tabel 4 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	42,862	3,286		13,042	,000		
Sustainability_Assurance	30,013	,800	,919	37,529	,000	,972	1,029
Regulasi_Pemerintah	21,175	3,415	,152	6,201	,000	,972	1,029
Tekanan_Stakeholder	,154	,027	,138	5,700	,000	,991	1,009

Sumber: Data dioolah dengan SPSS 22

Hasil uji parsial menunjukkan:

Sustainability Assurance memiliki nilai t = 37,529 dengan sig. = 0,000 (< 0,05) dan koefisien β = 0,919, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG. Regulasi Pemerintah memiliki nilai t = 6,201 dengan sig. = 0,000 (< 0,05) dan β = 0,152, memperlihatkan pengaruh positif serta nyata pada kualitas laporan ESG. Tekanan Stakeholder mempunyai angka t = 5,700 berikut sig. = 0,000 (< 0,05) serta β = 0,138, turut memberi pengaruh positif nyata pada kualitas laporan ESG. Di antara ketiga peubah itu, Sustainability Assurance mempunyai pengaruh paling menonjol pada kualitas laporan ESG karena nilai koefisien beta dan t hitung yang tertinggi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 *Model Summary*^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,957 ^a	,915	,913	4,80746	1,936

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22

Koefisien determinasi diaplikasikan guna memahami seberapa kuat kapasitas variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Mengacu pada luaran *Model Summary*, didapat angka *R Square* sejumlah 0,915 atau 91,5.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder secara kolektif sanggup menguraikan 91,5% fluktuasi perubahan pada kualitas laporan ESG. Sedangkan, baki sejumlah 8,5% diterangkan oleh variabel berbeda di eksternal kerangka riset, layaknya elemen tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, atau tingkat kesadaran keberlanjutan yang tak diinput ke dalam kerangka ini.

Selain itu, nilai angka *Adjusted R Square* sejumlah 0,913 memastikan bahwasanya model mempunyai level presisi yang amat prima dan tidak terjadi penyimpangan berarti akibat jumlah variabel independen yang digunakan. Angka korelasi majemuk ($R = 0,957$) pun mengindikasikan eksistensi relasi yang sedemikian erat antara ketiga variabel independen dengan kualitas laporan ESG. Oleh karena itu, bisa diputuskan jika model regresi mempunyai kekuatan eksplanasi yang tinggi dan variabel-variabel dalam penelitian ini berkontribusi signifikan dalam membentuk kualitas pelaporan ESG perusahaan di pasar modal Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sustainability Assurance terhadap Kualitas Laporan ESG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainability assurance memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas laporan ESG dibandingkan regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder. Dominannya pengaruh assurance menegaskan bahwa mekanisme verifikasi independen merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keberlanjutan. Temuan ini memperkuat teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan, tetapi juga melalui jaminan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan Simnett et al. (2009) dan Hodge et al. (2009) yang menemukan bahwa laporan keberlanjutan yang disertai assurance memiliki kualitas informasi yang lebih tinggi dan tingkat kepercayaan pengguna yang lebih besar. Studi di Indonesia oleh Setiatin (2024) dan Utami et al. (2024) juga menunjukkan bahwa assurance eksternal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan reliabilitas pengungkapkan ESG. Dengan demikian, temuan ini memperluas bukti empiris bahwa assurance tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepatuhan, tetapi sebagai mekanisme tata kelola yang substantif.

Implikasi teoretis dari dominannya sustainability assurance adalah bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder memerlukan dukungan mekanisme akuntabilitas agar efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan ESG. Tanpa assurance, laporan ESG berpotensi bersifat simbolik dan digunakan semata sebagai alat legitimasi. Oleh karena itu, assurance berperan sebagai jembatan yang

menghubungkan tuntutan legitimasi dan tekanan stakeholder dengan praktik pelaporan ESG yang kredibel dan bermakna.

Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan ESG

Regulasi pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG, namun dengan koefisien yang lebih kecil dibandingkan sustainability assurance. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi berfungsi sebagai prasyarat minimum (baseline requirement) dalam mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi keberlanjutan, tetapi belum sepenuhnya menjamin kualitas pengungkapan yang tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2023) yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 meningkatkan konsistensi pelaporan keberlanjutan, namun belum sepenuhnya mendorong kedalaman dan kualitas informasi ESG. Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi, di mana perusahaan cenderung mematuhi regulasi untuk memperoleh legitimasi formal dari regulator, tetapi sering kali membatasi pengungkapan pada tingkat minimum yang diwajibkan.

Dalam konteks Indonesia, regulasi pelaporan keberlanjutan masih relatif baru dan lebih menekankan pada kewajiban pelaporan dibandingkan penilaian kualitas substansi informasi. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh regulasi terhadap kualitas laporan ESG lebih lemah dibandingkan assurance, yang secara langsung menilai keandalan dan akurasi isi laporan. Dengan demikian, regulasi berperan sebagai pendorong awal (compliance-driven reporting), sementara peningkatan kualitas yang lebih substantif bergantung pada mekanisme internal seperti assurance.

Pengaruh Tekanan Stakeholder terhadap Kualitas Laporan ESG

Tekanan stakeholder juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG, meskipun koefisinya lebih kecil dibandingkan sustainability assurance. Temuan ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa tuntutan dari investor, media, dan masyarakat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG.

Namun, lebih kecilnya koefisien tekanan stakeholder mengindikasikan bahwa di Indonesia, tekanan stakeholder belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara kuat. Temuan ini sejalan dengan Nurdialy dan Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa tekanan stakeholder di negara berkembang cenderung bersifat selektif dan lebih terfokus pada perusahaan besar atau sektor tertentu. Selain itu, tingkat literasi ESG investor ritel dan keterlibatan masyarakat sipil di Indonesia masih berkembang, sehingga tekanan terhadap kualitas pelaporan ESG belum merata.

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan stakeholder berperan sebagai mekanisme eksternal penting, efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan institusional dan kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan. Oleh karena itu, tanpa dukungan mekanisme verifikasi seperti assurance, tekanan stakeholder cenderung mendorong peningkatan kuantitas pengungkapan dibandingkan kualitas substansinya.

Pengaruh Simultan Sustainability Assurance, Regulasi Pemerintah, dan Tekanan Stakeholder

Uji simultan (uji F) memperlihatkan jika ketiga peubah bebas secara serentak memberikan pengaruh nyata pada kualitas laporan ESG ($F = 523,518$; $sig. = 0,000$). Angka koefisien determinasi (R^2) sejumlah 0,915 menandakan bahwasanya **91,5%** fluktuasi **kualitas laporan ESG** sanggup diuraikan oleh ketiga elemen itu, sementara 8,5% bakinya ditentukan oleh elemen berbeda di eksternal kerangka, semisal tata kelola korporasi, skala usaha, profitabilitas, ataupun kultur organisasi.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan ESG. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelaporan ESG di Indonesia merupakan hasil interaksi antara tekanan eksternal dan mekanisme internal perusahaan.

Dominannya sustainability assurance dibandingkan regulasi dan tekanan stakeholder mencerminkan karakteristik konteks pasar modal Indonesia, di mana sistem regulasi dan tekanan sosial

masih berkembang, sehingga mekanisme internal berbasis tata kelola memainkan peran yang lebih menentukan dalam meningkatkan kualitas pelaporan. Dengan demikian, temuan ini memperkaya literatur ESG dengan menunjukkan bahwa di pasar berkembang, kualitas laporan ESG lebih ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas internal dibandingkan tekanan eksternal semata.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder terhadap kualitas laporan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan ESG, baik secara parsial maupun simultan. Di antara ketiganya, sustainability assurance terbukti memiliki pengaruh paling dominan, yang menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi independen dalam meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keberlanjutan.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat integrasi teori legitimasi, teori stakeholder, dan teori akuntabilitas dalam menjelaskan praktik pelaporan ESG. Regulasi pemerintah dan tekanan stakeholder berfungsi sebagai pendorong eksternal yang memotivasi perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan, sementara sustainability assurance berperan sebagai mekanisme internal yang memastikan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan tersebut diwujudkan dalam laporan ESG yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa kualitas laporan ESG di pasar modal Indonesia lebih ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas internal dibandingkan tekanan eksternal semata.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis dan kebijakan. Bagi perusahaan, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sustainability assurance bukan sekadar pemenuhan formalitas, melainkan strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan ESG dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan didorong untuk mengintegrasikan assurance eksternal sebagai bagian dari tata kelola keberlanjutan jangka panjang.

Bagi **regulator**, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada kewajiban penyampaian laporan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keandalan informasi ESG. Regulator dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman yang lebih rinci terkait standar kualitas laporan ESG serta mendorong adopsi sustainability assurance secara lebih luas.

Bagi **investor**, penelitian ini memberikan informasi bahwa keberadaan sustainability assurance dapat dijadikan indikator penting dalam menilai kredibilitas dan kualitas laporan ESG perusahaan. Investor diharapkan tidak hanya memperhatikan keberadaan laporan keberlanjutan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan mekanisme penjaminan informasi ESG sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengukuran kualitas laporan ESG didasarkan pada content analysis yang berpotensi mengandung unsur subjektivitas, meskipun telah mengacu pada standar pelaporan yang berlaku. Kedua, penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga generalisasi hasil ke konteks sektor atau negara lain perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, variabel independen yang digunakan masih terbatas pada sustainability assurance, regulasi pemerintah, dan tekanan stakeholder, sementara faktor lain seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, atau karakteristik dewan direksi belum dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan faktor tata kelola dan karakteristik perusahaan lainnya, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, serta membandingkan konteks Indonesia dengan negara lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas laporan ESG. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran jenis dan tingkat sustainability assurance terhadap kualitas pelaporan ESG secara lebih mendalam.

REFERENSI

Hidayati, R. (2023). *Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Berkelanjutan, 8(2), 45–58.

Nurdialy, A., & Wijaya, R. (2023). *Stakeholder Pressure dan Kualitas Pengungkapan ESG pada Perusahaan Publik di Asia Tenggara*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 14(1), 55–68.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.

Putri, A., & Silvia, D. (2025). *Analisis Pengaruh Tekanan Stakeholder terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan Perusahaan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 13(1), 77–90.

Rahmawati, N., & Hamzah, A. (2025). *Legitimacy Theory dan Kualitas Pelaporan ESG: Studi Empiris pada Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 10(1), 15–29.

Setiatin, T. (2024). *Sustainability Assurance dan Implikasinya terhadap Kualitas Pengungkapan ESG*. Jurnal Akuntabilitas dan Keberlanjutan, 9(3), 120–134.

Utami, D., Prabowo, Y., & Lestari, I. (2024). *Peran Assurance Eksternal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keberlanjutan*. Jurnal Akuntansi dan Audit Berkelanjutan, 12(2), 88–101.

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.

Hodge, K., Subramaniam, N., & Stewart, J. (2009). Assurance of sustainability reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(5), 765–786.

Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and quality. *Accounting in Europe*, 12(2), 159–188.